

G. BELANJA APBD LAINNYA

Belanja APBD lainnya merupakan belanja APBD Tahun 2017 yang dilaporkan sebagai bagian dari pelaporan pertanggungjawaban Bupati yang tidak melaporkan dalam pembagian urusan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, namun dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Belanja APBD lainnya masuk dalam pos belanja tidak langsung APBD.

Pada tahun 2017, belanja tidak langsung dikelola oleh BPPKAD selaku PPKD. Selengkapnya belanja APBD lainnya adalah sebagai berikut;

a. Alokasi Belanja Tidak Langsung

Pemerintah daerah kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp. 312.084.576.000,-** atau 15,6 % dari total APBD 2017 Rp. **2.000.613.704.761,-**. Dari anggaran sebesar **Rp. 312.084.576.000,-** dapat teralisasi sebesar **Rp. 310.636.294.000,-** atau 99,54%. Alokasi belanja tidak langsung yang dikelola oleh PPKD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. III.G.2.1
Rincian Belanja Tidak Langsung dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
	Belanja Tidak Langsung	312.084.576.000,-	310.636.294.000,-
1.	Belanja Hibah	14.609.600.000,-	14.202.400.000,-
a.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	400.000.000,-	210.000.000,-
b.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	100.000.000,-	100.000.000,-
c.	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	14.109.600.000,-	13.892.400.000,-
2	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,-	4.995.500.000,-
a.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	85.500.000,-	85.500.000,-
b.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	4.914.500.000,-	4.910.000.000,-
3	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.235.150.000,-	4.235.150.000,-
a.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.242.150.000,-	3.242.150.000,-
.b	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	993.000.000,-	993.000.000,-
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan	283.239.826.000,-	283.214.026.000,-

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
	Desa, Partai Politik		
a.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	281.816.626.000,-	281.790.826.000,-
b.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.423.200.000,-	1.423.200.000,-
5	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,-	3.989.218.000,-
a.	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,-	3.989.218.000,-

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2017 (diolah)

Dari total anggaran Belanja tidak langsung yang dikelola oleh PPKD proporsi terbesar dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik yang terdiri dari belanja bantuan keuangan kepada desa senilai Rp. 281.816.626.000,- dan Belanja Bantuan Kepada Partai Politik senilai Rp. 1.423.200.000,-

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Belanja Alokasi Dana Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBN, Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembayaran Kompensasi Perangkat Desa, Pendamping Replika PLPBK dan TMMD, sedangkan belanja Bantuan Kepada Partai Politik ada 10 partai politik yang memperoleh bantuan pada tahun 2017 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai HANURA, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NASDEM, Partai GOLKAR, Partai Demokrat, Partai GERINDRA, Partai Amanat Nasional dan PKS.

Selain itu pada tahun 2017 pemerintah kabupaten Wonosobo mengalokasikan belanja tidak langsung berupa Belanja Hibah untuk Badan/Lembaga/Organisasi, Kelompok/Anggota Masyarakat dan Dana BOP PAUD dan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan anggota Masyarakat.

Untuk antisipasi kejadian yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup pemerintah kabupaten selain mengalokasikan belanja langsung berupa kegiatan ketanggapdaruratan bencana melalui BPBD, juga mengalokasikan Dana Tak Terduga senilai Rp. 5.000.000.000,- dan terserap Rp. 3.989.218.000,-

b. Alokasi dan Realisasi Belanja APBDesa

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Sebelum diterbitkannya UU ini anggaran desa masih bertumpu pada APBD, namun setelah dikeluarkannya undang-undang ini desa sudah bisa dikatakan mandiri, tidak tergantung pada APBD, namun demikian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah kabupaten/ kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tidak dapat dipungkiri kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang masih didominasi dengan daerah administrasi desa dengan jumlah total desa 236 sedangkan kelurahan 29, oleh karena itu keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan APBDes tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. III.G.2.2 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes
Tahun 2017**

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	27.646.332.399	27.811.841.327	(165.508.928)
Pendapatan Transfer	304.364.926.000	304.456.155.075	(91.229.075)
Pendapatan Lain lain	228.110.054	293.075.572	(64.965.518)
JUMLAH PENDAPATAN	332.239.368.453	332.561.071.974	(321.703.521)
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	94.576.255.632	90.705.370.049	3.870.885.583
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	180.490.200.683	175.752.447.394	4.737.753.290
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	11.157.147.382	11.060.603.256	96.544.126
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.556.087.755	46.648.498.856	907.588.899
Bidang Tak Terduga	313.358.019	94.307.893	219.050.126
JUMLAH BELANJA	334.093.049.471	324.261.227.447	9.831.822.024
SURPLUS / DEFISIT	(1.853.681.018)	8.299.844.527	(10.153.525.545)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	4.409.278.604	4.451.248.429	(41.969.825)
Pengeluaran Pembiayaan	2.555.597.586	2.210.143.781	345.453.805
Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan –Pengeluaran Pembiayaan)	1.853.681.018	2.241.104.648	(387.423.630)
SILPA Tahun Berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)	-	10.540.949.175	(10.540.949.175)

Sumber: Bagian Pemerintahan SETDA, 2017